



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: III (tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI</b>
Hari/Tanggal	: <b>Kamis, 16 April 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 10.35 – 14.50 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H. M. Sohibul Iman, Ph.D./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Perkembangan Rancangan Renstra Kemenristekdikti RI; 2. Pembahasan tentang implementasi program pendidikan tinggi; dan 3. Lain-lain
Hadir	: 35 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ H. M. Sohibul Iman, Ph.D. membuka Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI pada pukul 10.35 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN**

**1. Perkembangan Rancangan Renstra Kemenristekdikti RI**

a. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI agar:

- 1) segera menyelesaikan beberapa RPP yang terkait dengan pendidikan tinggi, untuk itu Kemenristekdikti RI harus berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait;

- 2) melaksanakan amanat Pasal 57 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pembentukan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi;
- 3) untuk terus meningkatkan kualitas LPTK dan memenuhi amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen utamanya pemenuhan LPTK berasrama.

**2. Implementasi Program Pendidikan Tinggi**

- a. Komisi X DPR RI membentuk Panja BOPTN dalam rangka mengevaluasi dan memperbaiki terhadap pembiayaan dan pengalokasian BOPTN sebagaimana amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Perguruan Tinggi Kesehatan dan kebijakannya.

**3. Lain-lain**

- a. Komisi X DPR RI memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang tunjangan kinerja sebesar Rp 1,2 Triliun yang masih berada di Sekretariat Jenderal Kemendikbud RI.
- b. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI agar berkoordinasi dengan Menpan dan RB untuk menyelesaikan status para pegawai PTS yang telah berubah menjadi PTN baru.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB

KETUA,



H. M. SOHIBUL IMAN, Ph.D. *si*